



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ditetapkannya Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional oleh Instansi Pembina, diperlukan penyesuaian terhadap Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibayarkan dihitung sejak pejabat/pegawai diangkat ke dalam jabatan tersebut.

- KETIGA : Kelas Jabatan untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan/atau sampai dengan adanya mutasi pejabat fungsional.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG KELAS JABATAN DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH.  
NOMOR : 94 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26 April 2021

DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No       | NAMA JABATAN  | KELAS JABATAN |
|----------|---|---------------|
| (1)      | (2)   | (3)           |
| <b>A</b> | <b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b>                                      |               |
| 1        | Sekretaris Utama  | 16            |
| 2        | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan                                | 15            |
| 3        | Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia               | 15            |
| 4        | Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum         | 15            |
| 5        | Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan                   | 16            |
| 6        | Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum         | 15            |
| 7        | Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus       | 15            |
| 8        | Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional       | 15            |
| 9        | Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi | 16            |
| 10       | Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan             | 15            |
| 11       | Direktur Pengembangan Sistem Katalog                                | 15            |
| 12       | Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik            | 15            |
| 13       | Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia        | 16            |
| 14       | Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan                       | 15            |
| 15       | Direktur Sertifikasi Profesi  | 15            |
| 16       | Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa                       | 16            |
| 17       | Direktur Advokasi Pemerintah Pusat                                  | 15            |
| 18       | Direktur Advokasi Pemerintah Daerah                                 | 15            |
| 19       | Direktur Penanganan Permasalahan Hukum                              | 15            |
| 20       | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa         | 15            |
| 21       | Inspektur   | 15            |
|          |   |               |

| No       | NAMA JABATAN  | KELAS JABATAN |
|----------|---|---------------|
| <b>B</b> | <b>Jabatan Administrasi</b>   |               |
|          | <b>Jabatan Administrator</b>  |               |
| 1        | Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara | 12            |
| 2        | Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga                     | 12            |
|          | <b>Jabatan Pengawas</b>   |               |
| 1        | Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga                              | 9             |
| 2        | Kepala Subbagian Tata Usaha   | 9             |
|          | <b>Jabatan Pelaksana</b>  |               |
| 1        | Analisis Akreditasi Lembaga Diklat                                      | 7             |
| 2        | Analisis Barang Milik Negara  | 7             |
| 3        | Analisis Berkas Sengketa  | 7             |
| 4        | Analisis Data dan Informasi   | 7             |
| 5        | Analisis Diklat   | 7             |
| 6        | Analisis Hukum  | 7             |
| 7        | Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama                                      | 7             |
| 8        | Analisis Kebijakan Barang Milik Negara                                  | 7             |
| 9        | Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional                               | 7             |
| 10       | Analisis Kerjasama Diklat   | 7             |
| 11       | Analisis Kinerja  | 7             |
| 12       | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                             | 7             |
| 13       | Analisis Organisasi   | 7             |
| 14       | Analisis Pengembangan Kinerja   | 7             |
| 15       | Analisis Pengembangan Kompetensi  | 7             |
| 16       | Analisis Perencanaan  | 7             |
| 17       | Analisis Perencanaan Anggaran   | 7             |
| 18       | Analisis Perencanaan dan Kerjasama                                      | 7             |
| 19       | Analisis Perencanaan SDM Aparatur                                       | 7             |
| 20       | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan                            | 7             |
| 21       | Analisis Permasalahan Hukum   | 7             |
| 22       | Analisis Protokol   | 7             |
| 23       | Analisis Satuan Pengawas Internal                                       | 7             |
| 24       | Analisis Sistem Informasi   | 7             |
| 25       | Analisis Tata Laksana   | 7             |
| 26       | Analisis Tata Usaha   | 7             |
| 27       | Bendahara   | 7             |
| 28       | Penata Kendaraan Dinas  | 7             |
| 29       | Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa                            | 7             |
| 30       | Penelaah Pengembangan Usaha   | 7             |
| 31       | Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa                           | 7             |
| 32       | Perancang Naskah Soal   | 7             |
| 33       | Ajudan  | 6             |
| 34       | Pengadministrasi Perlengkapan   | 6             |
| 35       | Pengelola Administrasi dan Verifikasi                                   | 6             |
| 36       | Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi                      | 6             |
| 37       | Pengelola Barang Milik Negara (BMN)                                     | 6             |
| 38       | Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi                              | 6             |
| 39       | Pengelola Data Monitoring Berkas Sengketa                               | 6             |

| <b>No</b> | <b>NAMA JABATAN</b>                                    | <b>KELAS JABATAN</b> |
|-----------|--|----------------------|
| 40        | Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa | 6                    |
| 41        | Pengelola Keuangan                                     | 6                    |
| 42        | Pengelola Media Center dan Kemitraan Media             | 6                    |
| 43        | Pengelola Sertifikasi                                  | 6                    |
| 44        | Pengelola Situs/Web                                    | 6                    |
| 45        | Pengelola Teknologi Informasi                          | 6                    |
| 46        | Pranata Barang dan Jasa                                | 6                    |
| 47        | Sekretaris   | 6                    |
| 48        | Teknisi Uji Kompetensi                                 | 6                    |
| 49        | Verifikator Anggaran                                   | 6                    |
| 50        | Pengadministrasi Keuangan                              | 5                    |
| <b>C</b>  | <b>Jabatan Fungsional</b>                              |                      |
| 1         | Analisis Hukum Utama                                   | 13                   |
| 2         | Analisis Hukum Madya                                   | 11                   |
| 3         | Analisis Hukum Muda                                    | 9                    |
| 4         | Analisis Hukum Pertama                                 | 8                    |
| 5         | Analisis Kebijakan Utama                               | 14                   |
| 6         | Analisis Kebijakan Madya                               | 12                   |
| 7         | Analisis Kebijakan Madya*                              | 12                   |
| 8         | Analisis Kebijakan Muda                                | 10                   |
| 9         | Analisis Kebijakan Muda*                               | 9                    |
| 10        | Analisis Kebijakan Pertama                             | 8                    |
| 11        | Analisis Kepegawaian Madya                             | 11                   |
| 12        | Analisis Kepegawaian Madya*                            | 12                   |
| 13        | Analisis Kepegawaian Muda                              | 9                    |
| 14        | Analisis Kepegawaian Muda*                             | 9                    |
| 15        | Analisis Kepegawaian Pertama                           | 8                    |
| 16        | Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya                 | 12                   |
| 17        | Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya*                | 12                   |
| 18        | Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda                  | 10                   |
| 19        | Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda*                 | 9                    |
| 20        | Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama               | 8                    |
| 21        | Analisis SDM Aparatur Utama                            | 14                   |
| 22        | Analisis SDM Aparatur Madya                            | 12                   |
| 23        | Analisis SDM Aparatur Muda                             | 10                   |
| 24        | Analisis SDM Aparatur Pertama                          | 8                    |
| 25        | Arsiparis Utama  | 13                   |
| 26        | Arsiparis Madya  | 11                   |
| 27        | Arsiparis Muda   | 9                    |
| 28        | Arsiparis Muda*  | 9                    |
| 29        | Arsiparis Pertama                                      | 8                    |
| 30        | Arsiparis Penyelia                                     | 8                    |
| 31        | Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan                     | 7                    |
| 32        | Arsiparis Terampil/Pelaksana                           | 6                    |
| 33        | Assessor SDM Aparatur Utama                            | 14                   |
| 34        | Assessor SDM Aparatur Madya                            | 12                   |
| 35        | Assessor SDM Aparatur Madya*                           | 12                   |

| No | NAMA JABATAN                                   | KELAS JABATAN |
|----|--|---------------|
| 36 | Assessor SDM Aparatur Muda                     | 10            |
| 37 | Assessor SDM Aparatur Muda*                    | 9             |
| 38 | Assessor SDM Aparatur Pertama                  | 8             |
| 39 | Auditor Utama                                  | 13            |
| 40 | Auditor Madya                                  | 11            |
| 41 | Auditor Muda                                   | 9             |
| 42 | Auditor Pertama                                | 8             |
| 43 | Penata Laksana Barang Penyelia                 | 9             |
| 44 | Penata Laksana Barang Mahir                    | 8             |
| 45 | Penata Laksana Barang Terampil                 | 7             |
| 46 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya          | 12            |
| 47 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda           | 10            |
| 48 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama        | 8             |
| 49 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Utama        | 14            |
| 50 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya        | 12            |
| 51 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda         | 10            |
| 52 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama      | 8             |
| 53 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama   | 15            |
| 54 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya   | 13            |
| 55 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya*  | 12            |
| 56 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda    | 11            |
| 57 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda*   | 9             |
| 58 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | 9             |
| 59 | Perencana Utama                                | 14            |
| 60 | Perencana Madya                                | 12            |
| 61 | Perencana Madya*                               | 12            |
| 62 | Perencana Muda                                 | 10            |
| 63 | Perencana Muda*                                | 9             |
| 64 | Perencana Pertama                              | 9             |
| 65 | Pranata Humas Utama                            | 13            |
| 66 | Pranata Humas Madya                            | 11            |
| 67 | Pranata Humas Muda                             | 9             |
| 68 | Pranata Humas Muda*                            | 9             |
| 69 | Pranata Humas Pertama                          | 8             |
| 70 | Pranata Keuangan APBN Penyelia                 | 8             |
| 71 | Pranata Keuangan APBN Mahir                    | 7             |
| 72 | Pranata Keuangan APBN Terampil                 | 6             |
| 73 | Pranata Komputer Utama                         | 13            |
| 74 | Pranata Komputer Madya                         | 11            |
| 75 | Pranata Komputer Madya*                        | 12            |
| 76 | Pranata Komputer Muda                          | 9             |
| 77 | Pranata Komputer Muda*                         | 9             |
| 78 | Pranata Komputer Pertama                       | 8             |
| 79 | Pranata Komputer Penyelia                      | 8             |
| 80 | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir      | 7             |
| 81 | Pranata Komputer Pelaksana/Terampil            | 6             |
| 82 | Pranata Komputer Pelaksana Pemula              | 5             |
| 83 | Pustakawan Pertama                             | 8             |

| No | NAMA JABATAN               | KELAS JABATAN |
|----|----------------------------|---------------|
| 84 | Sandiman Utama             | 14            |
| 85 | Sandiman Madya             | 12            |
| 86 | Sandiman Muda              | 10            |
| 87 | Sandiman Pertama           | 8             |
| 88 | Statistisi Utama           | 13            |
| 89 | Statistisi Madya           | 11            |
| 90 | Statistisi Muda            | 9             |
| 91 | Statistisi Pertama         | 8             |
| 92 | Widyaiswara Utama          | 13            |
| 93 | Widyaiswara Madya          | 11            |
| 94 | Widyaiswara Madya*         | 12            |
| 95 | Widyaiswara Muda           | 9             |
| 96 | Widyaiswara Muda*          | 9             |
| 97 | Widyaiswara Pertama        | 8             |
| 98 | Manggala Informatika Muda* | 9             |

Keterangan :

- \* Kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional yang merupakan hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO